

**LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**IMPLEMENTATION REPORT  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**2017**



**PT.BPR DANA MULTI GUNA**

**Kantor Pusat : Jl.KH Dewantara No.63 Cikarang Utara Kab. Bekasi 17530**

**Telp : (021) 890 1415, 890 2691**

**Fax : (021) 8910 8168, 8911 5922**

**Kantor Kas : Ruko Permata Gardenia Blok H No.37**

**Jl.Irigasi Raya – Kota Jababeka -Kab.Bekasi**

**Telp : (021) 8984 2032, 8983 2480**

**Fax : (021) 8983 2480**

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

## IMPLEMENTATION REPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### PT.BPR Dana Multi Guna Untuk Posisi Tahun 2017

Laporan ini di susun berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT.BPR Dana Multi Guna selama tahun 2017

Cikarang,25 April 2018

ttd

Riwandari Juniasti  
Direktur Utama

ttd

Muhamad Alwin  
Direktur

Menyetujui

ttd

Drs .H Soenarko  
Komisaris Utama

ttd

Darheni Cahya Novianti  
Komisaris



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR DANA MULTI GUNA

## I. PENDAHULUAN

### 1. Tujuan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna

Menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT.BPR Dana Multi Guna ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat.
- b. Mendukung Misi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu :
  - Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.
  - Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
  - Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
  - Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)
  - Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
  - Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*)

### 2. Referensi

Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna, dilakukan dengan mengacu :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

### **3. Pernyataan komitmen Penerapan Tata Kelola**

Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT.BPR Dana Multi Guna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT.BPR Dana Multi Guna dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT.BPR Dana Multi Guna berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

### **4. Struktur Tata Kelola**

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ / unit kerja di PT.BPR Dana Multi Guna telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna, terdiri dari :

- 1). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2). Dewan Komisaris
- 3). Dewan Direksi
- 4). Fungsi APU-PPT dan Audit Internal.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut diatas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, wewenang serta fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **5. Hasil GCG Self Assesment**

Pada tahun 2017, PT.BPR Dana Multi Guna melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *Governance* yaitu :

- 1). ***Governance structure*** , Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai terkait BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur , sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- 2). ***Governance Process***, Efektivitas proses penerapan tata kelola BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.
- 3). ***Governance Outcome***, hasil penerapan Tata Kelola BPR  
Adapun 3 (tiga) aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
  - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.
  - d. Penanganan benturan kepentingan.
  - e. Penerapan fungsi kepatuhan.
  - f. Penerapan fungsi audit intern.
  - g. Penerapan fungsi audit ekstern.
  - h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
  - i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  - j. Rencana strategis BPR
  - k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil Penilaian sendiri (*Self Assesment*) pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada Tahun 2017 dikategorikan kedalam **“Peringkat 2” (“Baik”)**. Manajemen PT.BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan / penerapan prinsip GCG yang memadai, apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen PT.BPR Dana Multi Guna.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assesment*) terhadap aspek *Governance Struktural*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* pada masing-masing faktor Penilaian Penerapan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>FAKTOR PENILAIAN</b>	<b>SKOR 1-5</b>	<b>BOBOT</b>	<b>SKOR TERBOBOT</b>
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b> 1.1. Governance Structure 1.2. Governance Process 1.3. Governance Outcome	<b>2,27</b> 2,00 2,63 2,20	<b>20%</b> 50% 40% 10%	<b>0,45</b> 1,00 1,05 0,22
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b> 2.1. Governance Structure 2.2. Governance Process 2.3. Governance Outcome	<b>2,41</b> 2,22 2,75 2,00	<b>15%</b> 50% 40% 10%	<b>0,36</b> 1,11 1,10 0,20
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b> 3.1. Governance Structure 3.2. Governance Process 3.3. Governance Outcome	0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0%	0,00 0,00 0,00 0,00
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b> 4.1. Governance Structure 4.2. Governance Process 4.3. Governance Outcome	<b>3,50</b> 4,00 3,00 3,00	<b>10%</b> 50% 40% 10%	<b>0,35</b> 2,00 1,20 0,30
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b> 5.1. Governance Structure 5.2. Governance Process 5.3. Governance Outcome	<b>3,36</b> 3,40 3,40 3,00	<b>10.00%</b> 50% 40% 10%	<b>0,34</b> 1,70 1,36 0,30
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b> 6.1. Governance Structure 6.2. Governance Process 6.3. Governance Outcome	<b>2,53</b> 2,40 2,75 2,25	<b>10.00%</b> 50% 40% 10%	<b>0,25</b> 1,20 1,10 0,23
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b> 7.1. Governance Structure 7.2. Governance Process 7.3. Governance Outcome	<b>2,10</b> 2,00 2,00 3,00	<b>2,50%</b> 50% 40% 10%	<b>0,05</b> 1,00 0,80 0,30
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk SPI</b> 8.1. Governance Structure 8.2. Governance Process 8.3. Governance Outcome	0,00 0,00 0,00 0,00	<b>10%</b> 50% 40% 10%	0,00 0,00 0,00 0,00

NO.	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b> 9.1. Governance Structure 9.2. Governance Process 9.3. Governance Outcome	<b>2,80</b> 3,00 3,00 1,00	<b>7,50%</b> 50% 40% 10%	<b>0,21</b> 1,50 1,20 0,10
10	<b>Rencana Strategi BPR</b> 10.1. Governance Structure 10.2. Governance Process 10.3. Governance Outcome	<b>2,40</b> 2,00 3,00 2,00	<b>7,50</b> 50% 40% 10%	<b>0,18</b> 1,00 1,20 0,20
11	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b> 11.1. Governance Structure 11.2. Governance Process 11.3. Governance Outcome	<b>2,50</b> 3,00 2,00 2,00	<b>7,5%</b> 50% 40% 10%	<b>0,19</b> 1,50 0,80 0,20
	<b>Total Skor : 2,38</b> <b>Predikat Komposit : Baik</b>			

## 6. Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT.BPR Dana Multi Guna, sekurang-kurangnya terdiri dari Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Laporan penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan BPR dalam 1(satu) Tahun terakhir.



Berikut ini adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) PT.BPR Dana Multi Guna selama tahun 2017 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi;
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif
- D. Kepemilikan saham anggota Direksi;
- E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR;
- F. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR;
- H. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- I. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris;
- K. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- L. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- N. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.
- O. Hasil Penilaian (*Self Assesment*).

## II. PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR DANA MULTI GUNA

### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka Direksi Bank diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah anggota Direksi PT.BPR Dana Multi Guna adalah 2 (dua) orang. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan POJK Tata Kelola BPR. Setiap anggota Direksi BPR DMG memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Direksi PT. BPR Dana Multi Guna telah disetujui oleh BI/OJK dan masing-masing anggota telah dinyatakan lulus tes kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh BI/OJK.

Dalam menjalankan tugasnya Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

**Komposisi Pemegang Saham PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2017 sebagai berikut:**

No	Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham		
			Lembar	Nominal	%
1	Riwandari Juniasti	Direktur Utama	1.311	Rp.1.311.000.000,00	65,55
2	Ir.H.Darmanto	Pemegang Saham	400	Rp.400.000.000,00	20,00
3	Drs.H.Soenarko	Komisaris Utama	250	Rp.250.000.000,00	12,50
4	Ny.Goetit Sri Sulasmini	Komisaris	39	Rp.39.000.000,00	1,95

**Susunan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :**

No	Nama Direksi Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasaan	Domisili
1	Riwandari Juniasti Direktur Utama	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta
2	Muhamad Alwin Direktur	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Bekasi

### Profil Dewan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna

Riwandari Juniasti <b>Direktur Utama</b>	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) , Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta tahun 1991, dan telah menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana di Universitas Gunadarma Jakarta tahun 2015, Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna tahun 1996 dari mempersiapkan pendirian sampai beroperasinya PT. BPR Dana
---	---

	Multi Guna, diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2002 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR tahun 2005. Saat ini telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi dibulan Desember 2011, dan terakhir di bulan April 2016. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 21 Desember 2021.
Muhamad Alwin <b>Direktur</b>	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Mulya Pratama Bekasi pada tahun 2004, dan telah menyelesaikan program pendidikan pasca sarjana di STIE PBM Jakarta tahun 2014. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 1999 dibagian Staff Administrasi , kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Kredit dan Marketing, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR pada tahun 2007. Telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi , dibulan April 2013. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 17 Juni 2018.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- e. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
  - 1) Fungsi Audit Intern;
  - 2) Fungsi Manajemen Risiko; dan
  - 3) Fungsi Kepatuhan.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### **Peningkatan Kompetensi**

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pelatihan / Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2017 sebagai berikut:

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penyelenggara</b>
Riwandari Juniasti <b>Direktur Utama</b>	Introduction To Disruption	22 s.d 23 Sept 2017	DPD Perbarindo DKI Jaya
	Transformasi Layanan Perbankan Menembus Era Digital	10 Oktober 2017	Infobank Institut
	Peluang dan Tantangan Industri BPR-BPRS sebagai Pilar Ekonomi Daerah di Era Transformasi Bisnis Digital	24 s.d 25 Okt 2017	DPP Perbarindo
	Peran Pengurus dalam Mengelola dan Meningkatkan Kinerja BPR	2 Des 2017	In House Training BPR DMG
	Manajemen BPR – Pemahaman Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pejabat Eksekutif BPR	14 s.d 7 Des 2017	In House Training BPR DMG
Muhamad Alwin <b>Direktur</b>	Penerapan POJK Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi BPR	8 Februari 2017	DPK Perbarindo Bekasi Timur
	Persiapan Fit & Proper Test Direktur Kepatuhan BPR	4 Mei 2017	DPK Perbarindo Bekasi Timur
	Penyusunan Action Plan & Pelaporan APU PPT bagi BPR sesuai POJK No.12	17 s.d 18 Mei 2017	Infobank Institut

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penyelenggara</b>
Muhamad Alwin <b>Direktur</b>	Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Industri BPR sesuai dengan SEOJK No.15/SEOJK.03/2017	14s.d 15 Sept 2017	Infobank Institut
	Menyusun Rencana Bisnis BPR	27 s.d 28 Okt 2017	Zpro Consulting
	Peran Pengurus dalam Mengelola dan Meningkatkan Kinerja BPR	2 Des 2017	In House Training BPR DMG

## **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka Dewan Komisaris Bank diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah tersebut melebihi dari jumlah anggota Direksi, namun pada awal 2018 BPR telah menyesuaikan komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai POJK, mengangkat kembali 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi melalui RUPSLB tanggal 4 Januari 2018 dan telah ditetapkan dalam akta Notaris No.1 tanggal 12 Januari 2018 Notaris Harinanto Sugiono,SH sambil menunggu proses perubahan kepengurusan yang telah diajukan ke OJK.

Setiap anggota Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Dewan Komisaris telah disetujui oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris beralih kepada pihak lain tersebut.

**Susunan Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:**

<b>No</b>	<b>Nama Dewan Komisaris Jabatan</b>	<b>Tanggal RUPS</b>	<b>Tanggal Efektif</b>	<b>Periode Penugasaan</b>	<b>Domisili</b>
1	Drs.Soenarko Komisaris Utama	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta

No	Nama Dewan Komisaris Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasaan	Domisili
2	Ny.Goetit Sri Sulasmini Komisaris	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta
3.	Darheni Cahya Noviyanti Komisaris	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta

### Profil Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna per 31 Desember 2017

Drs.H.Soenarko <b>Komisaris Utama</b>	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1968, melalui karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada Biro Organisasi Tata Kerja dan Pendidikan (Organik) pada Sekretariat Jendral Departemen Keuangan Terhitung mulai tanggal 01 Januari 1972, pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Salatiga pada tahun 1989 dan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kramatjati pada tahun 1995 dan pada tanggal 01 Maret 1996 memasuki masa pensiun, pada tahun 2002 diangkat sebagai Komisaris Utama sampai saat ini.
Goetit Sri Sulasmini <b>Komisaris</b>	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Fakultas Hukum Akademi Administrasi Niaga Negara, memulai karirnya sebagai sekretaris Direksi di Departement Store Sarinah, pada Tahun 2002 diangkat sebagai Komisaris sampai saat ini.
Darheni Cahya N <b>Komisaris</b>	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta. Memulai karir di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2011 dibagian Marketing, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas, pada tahun 2013 diangkat sebagai komisaris sampai saat ini setelah lulus sertifikasi direksi tahun 2010 dan lulus <i>fit and proper test</i> dibulan Desember 2012. Saat ini telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 19 Mei 2020.

### **Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen
- b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- d. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
- e. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- h. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

### **Peningkatan Kompetensi**

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Pelatihan / Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2017 sebagai berikut:

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penyelenggara</b>
Darheni Cahya N Komisaris	Penyusunan Laporan GCG	23 s.d 24 Feb 2017	Infobank
	Menyusun Laporan Audit Internal Sesuai SEOJK	17 Nov 2017	Perbarindo Depok

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penyelenggara</b>
	Peran Pengurus dalam Mengelola dan Meningkatkan Kinerja BPR	2 Des 2017	In House Training BPR DMG
	Manajemen BPR – Pemahaman Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pejabat Eksekutif BPR	14 s.d 17 Des 2017	In House Training BPR DMG

### **C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT EKSEKUTIF**

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif, dengan susunan sebagai berikut:

<b>Nama Pejabat Eksekutif</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Masa Jabatan</b>
Edwin yunarinda Satyagraha	Kepala Kantor Kas	2013 – Sekarang
Nurjanah	Audit Internal	2014 – Sekarang

#### **1) Fungsi Kepala Kantor Kas**

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepala Kantor Kas

- a. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Teller, Customer Service dan Bagian Umum di Kantor Kas;
- b. Memeriksa keabsahan transaksi di Kantor Kas;
- c. Menghitung kebutuhan uang kas setiap hari untuk keperluan Kantor Kas;
- d. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan operasional kantor kas;
- e. Bertanggung jawab atas jalannya core banking BPR untuk kegiatan perasional kantor kas;
- f. Peka terhadap pasar, dan kreatif memberikan ide produk baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah disekitar kantor kas;
- g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan Direksi.

#### **2) Fungsi Audit Intern**

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;



- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

#### **Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal**

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

#### **D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI**

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Dana Multi Guna	Perusahaan Lainnya
Riwandari Juniasti	Rp.1.311.000.000,00 (65,55%)	nihil
Muhamad Alwin	nihil	nihil

#### **E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.**

Nama Anggota Direksi	Keterkaitan	Hubungan	
		Keluarga	Keuangan
Riwandari Juniasti	Direksi Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
	Dewan Komisaris	Ada / tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang Saham	Ada / tidak semenda	Tidak ada
Muhamad Alwin	Direksi Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
	Dewan Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
	Pemegang Saham	Tidak ada	Tidak ada

**F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR Dana Multi Guna	BPR Lain	Perusahaan lainnya
Drs H.Soenarko	Rp.250.000.000,00 (12,50%)	nihil	nihil
Ny.Goetit Sri Sulasmini	Rp.39.000.000,00 (1,95%)	nihil	nihil
Darheni Cahya Noviyanti	nihil	nihil	nihil

**G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Keterkaitan	Hubungan	
		Keluarga	Keuangan
Drs.H.Soenarko	Dewan Komisaris Lainnya	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
	Dewan Direksi	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang Saham	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
Ny.Goetit Sri Sulasmini	Dewan Komisaris Lainnya	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
	Dewan Direksi	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang Saham	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
Darheni Cahya Noviyanti	Dewan Komisaris Lainnya	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
	Dewan Direksi	Ada/Tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang Saham	Ada/Tidak semenda	Tidak ada

**H. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.**

Berikut adalah Informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp.295.424.962,00	Rp.497.404.592,00
Tunjangan	Rp.133.000.000,00	Rp.102.000.000,00
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang.	-	-

**I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 4,5 X
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,5 X
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2,1 X
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,1 X
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,4 x

**J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Frekuensi Rapat Dewan Direksi selama tahun 2017 terdiri dari 18 kali Rapat

**Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Drs.H.Soenarko	18	18	100.00%
Ny.Goetit Sri Sulasmini	18	18	100.00%
Darheni Cahya Noviyanti	18	18	100.00%

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian internal BPR	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

**L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

Tidak ada permasalahan hukum baru di tahun 2017, hanya menyelesaikan dari proses hukum permasalahan yang dihadapi tahun lalu.

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
1	Muhamad Alwin Direktur	Riwandari Juniasti Direktur Utama	Kredit	250	No.0030000606 Tgl 28/08/17

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.**

- Selama tahun 2017, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan, namun hanya untuk kepada lingkungan masyarakat saja.
- Selama tahun 2017, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

**O. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)**

(terlampir)